

DIGITALISASI ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI *PEACEKEEPERS* DI UNIFIL (*UNITED INTERIM FORCE IN LEBANON*)

Nurul Azhari Giawa¹, Nodi Marefanda, M.A.P.²

Universitas Terbuka, Indonesia^{1,2}

Email: nurulazhari giawa@gmail.com¹

Abstrak

Digitalisasi administrasi merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan tugas penjaga perdamaian di *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme sistem digitalisasi administrasi yang diterapkan oleh *peacekeepers* di UNIFIL serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas pelayanan, koordinasi, dan pelaporan dalam operasi sehari-hari. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi. Subjek penelitian terdiri dari personel *peacekeepers* dari berbagai kontingen yang terlibat langsung dalam proses administrasi di UNIFIL. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam penerapan sistem digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan digitalisasi administrasi memberikan manfaat signifikan, termasuk percepatan pengolahan data, pengurangan kesalahan administratif, serta peningkatan akurasi dan transparansi pelaporan. Digitalisasi ini juga memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar kontingen, khususnya dalam berbagi informasi secara *real-time*. Namun, terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah operasional, hambatan adaptasi personel terhadap teknologi baru, dan risiko keamanan data yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, perbedaan tingkat kemahiran teknologi antar kontingen menjadi kendala dalam keseragaman implementasi. Solusi yang diusulkan meliputi pelatihan intensif untuk meningkatkan literasi digital personel, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan penerapan kebijakan keamanan siber yang lebih ketat. Mekanisme evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan operasional. Meskipun menghadapi tantangan, digitalisasi administrasi terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung tercapainya tujuan misi perdamaian secara lebih optimal. Perbaikan berkelanjutan, kolaborasi lintas kontingen, dan penyesuaian terhadap konteks operasional menjadi kunci keberhasilan implementasi digitalisasi ini, yang mendukung terciptanya perdamaian berkelanjutan di Lebanon Selatan.

Kata Kunci: Digitalisasi administrasi, UNIFIL, teknologi informasi, kordinasi, *Peacekeepers*.

Abstract

Digitalization of administration is a strategic step to enhance efficiency and effectiveness in carrying out peacekeeping tasks within the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). This study aims to examine the mechanisms of the administrative digitalization system implemented by peacekeepers in UNIFIL and to analyze its impact on service quality, coordination, and reporting in daily operations. A qualitative descriptive method with a case study approach was used. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and analysis of official documents. The research subjects comprised peacekeepers from various contingents directly involved in administrative processes at

UNIFIL. Thematic data analysis was conducted to identify patterns and relationships in the implementation of the digitalization system. The findings reveal that the implementation of administrative digitalization provides significant benefits, including faster data processing, reduced administrative errors, and improved accuracy and transparency in reporting. Digitalization also facilitates better coordination among contingents, especially in sharing real-time information. However, challenges remain, such as technological infrastructure limitations in certain operational areas, personnel adaptation barriers to new technologies, and data security risks that require special attention. Additionally, varying levels of technological proficiency among contingents affect the uniformity of implementation. Proposed solutions include intensive training to enhance personnel digital literacy, strengthening information technology infrastructure, and implementing stricter cybersecurity policies. Establishing a continuous evaluation mechanism is also essential to ensure the system remains relevant to operational needs. Despite these challenges, administrative digitalization has proven to improve operational efficiency and support the achievement of peacekeeping mission objectives. Continuous improvement, cross-contingent collaboration, and adaptation to operational contexts are key to its successful implementation, contributing to sustainable peace in Southern Lebanon.

Keywords: *Administrative digitalization, UNIFIL, information technology, coordination, peacekeepers.*

Pendahuluan

Pada faktor teknologi dan informasi Maxwell et al. (2023) mengungkapkan bahwa faktor ini adalah faktor krusial dalam mewujudkan digitalisasi yang mana teknologi dan informasi digunakan untuk memberikan efisiensi pada sektor publik untuk menjalankan dan mengambil perspektif, melakukan manajemen dan menggunakan serta memberikan informasi (Ramadhan, 2022).

Pada faktor teknologi terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah yang pertama bagaimana strategi dalam penggunaan teknologi dan informasi tersebut Ndou (2004) menjelaskan bahwa sektor yang dapat melakukan manajemen strategi yang baik dalam penggunaan teknologi dan informasi dengan melaraskan kesesuaian visi dan misi sektor tersebut maka akan menjadi kunci dalam mewujudkan kesuksesan pada digitalisasi (Ramadhan, 2022).

Kapasitas sumber daya manusia banyak penelitian yang menjelaskan bahwa faktor penting dari digitalisasi adalah bagaimana kualitas sumber daya yang dimiliki harus mempunyai skill pada kompetensi digital. Faktor ini juga membahas mengenai kualitas dari pemimpin yang bersifat visioner sehingga dapat mendukung adanya digitalisasi (Williams & O'Neill, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi transformasi berbagai sektor, termasuk dalam operasi-operasi penjaga perdamaian internasional.

Misi-misi perdamaian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pasukan penjaga perdamaian (*peacekeepers*) kini semakin mengadopsi teknologi digital untuk mendukung kelancaran dan efektivitas operasional mereka. Salah satu misi PBB yang menerapkan teknologi ini secara signifikan adalah *United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL)* (Masyrofah & Lubis, 2022; Sumertha et al., 2020).

Peacekeepers berperan sebagai aktor internasional yang bertugas melindungi warga sipil, memfasilitasi proses politik, dan membantu penegakan hukum dalam situasi konflik. Mereka juga mencatat bahwa *peacekeepers* sering menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya dukungan politik dan sumber daya (Bellamy et al., 2010).

UNIFIL didirikan pada tahun 1978 dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Lebanon Selatan, setelah konflik yang melibatkan Israel dan kelompok bersenjata lainnya. Dengan lingkungan yang dinamis dan penuh tantangan, dimana berbagai ancaman terhadap stabilitas regional masih ada, *UNIFIL* memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional di wilayah yang melibatkan berbagai negara anggota, berbicara dalam bahasa yang berbeda, dan bekerja dalam kondisi geografis dan infrastruktur yang sering kali terbatas. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi menjadi aspek yang semakin penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas tersebut. Dan keberhasilan misi perdamaian ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan operasional di lapangan, tetapi juga oleh kualitas sistem administrasi yang mendukung seluruh aktivitas misi (Newby, 2018).

Setelah penjelasan sebelumnya mengenai *UNIFIL* dan *Peacekeepers*, penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas lebih dalam lagi tentang tugas *Peacekeepers* pada *UNIFIL*. *Peacekeepers* yang bertugas di *United Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjalankan misi perdamaian, termasuk kebutuhan untuk memastikan efisiensi administrasi. Administrasi yang baik mendukung pelaksanaan tugas operasional, koordinasi antar unit, dan dokumentasi yang akurat. Namun, sistem administrasi tradisional seringkali menghadapi kendala seperti ketidakefisienan, keterbatasan akses informasi, dan potensi kesalahan manusia. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam mendukung tugas *peacekeepers*.

Sistem administrasi yang efisien dan transparan sangat penting dalam memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, baik itu negara kontributor pasukan, pemerintah lokal, maupun organisasi internasional lainnya. Dalam konteks ini, digitalisasi administrasi menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan misi perdamaian. Teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan dalam hal pengelolaan data, komunikasi, pelaporan, dan koordinasi antar unit yang tersebar di berbagai lokasi. Oleh karena itu, penerapan sistem mekanisme digitalisasi administrasi dalam misi *UNIFIL* menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesuksesan misi.

Digitalisasi administrasi di *UNIFIL* mencakup penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen yang terintegrasi untuk mempermudah pengolahan data administrasi, seperti laporan harian, logistik, koordinasi antar pasukan, dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Melalui sistem digital ini, informasi dapat diakses secara *real-time*, meminimalisir kesalahan manusia, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Selain itu, digitalisasi juga membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam menjaga integritas misi perdamaian internasional. Namun demikian, meskipun digitalisasi administrasi menawarkan banyak keuntungan, implementasinya tidak tanpa tantangan. Berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, masalah keamanan data, dan ketidaksetaraan dalam akses teknologi di beberapa wilayah, bisa menjadi kendala dalam proses digitalisasi (Fadri & Fil, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana mekanisme digitalisasi administrasi ini diterapkan dalam konteks *UNIFIL*, serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas sebagai *peacekeepers*.

Dari gambaran diatas penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait “*digitalisasi administrasi dalam pelaksanaan tugas sebagai peacekeepers di UNIFIL (UNITED INTERIM FORCE IN LEBANON)*”. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini

dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran teknologi dalam mendukung operasional misi perdamaian serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem administrasi di masa depan. Fokus utama dalam kajian ini adalah bagaimana digitalisasi administrasi dapat mempermudah proses operasional, meningkatkan komunikasi antar unit, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam misi perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi serta dampaknya terhadap kinerja para personel *UNIFIL*.

Selain itu, studi ini bertujuan untuk menyelesaikan kesenjangan dalam efisiensi dan akurasi administrasi tugas *peacekeepers* yang berdampak pada keberhasilan misi perdamaian. Dengan digitalisasi, diharapkan proses operasional menjadi lebih transparan, cepat, dan mampu meningkatkan koordinasi antar unit.

Penelitian ini mengacu pada teori manajemen informasi digital yang menekankan optimalisasi proses administrasi melalui teknologi. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari *peacekeepers* di *UNIFIL* melalui wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami tantangan dan peluang digitalisasi. Penelitian ini menjelaskan dan memberikan panduan implementasi digitalisasi administrasi dalam konteks misi perdamaian, yang dapat diadopsi oleh lembaga serupa.

Digitalisasi administrasi *peacekeepers* dapat menjadi model bagi misi perdamaian lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasi global dan memperkuat dukungan terhadap agenda perdamaian internasional. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang terdahulu, penelitian ini mungkin memiliki persamaan, yaitu penelitian ini berfokus pada peran teknologi dalam meningkatkan kinerja *peacekeepers*. Perbedaannya, penelitian ini secara spesifik akan membahas digitalisasi administrasi, mencakup pengelolaan tugas harian, pelaporan, dan semua tugas yang lebih terperinci di *UNIFIL*, yang juga jarang menjadi fokus penelitian sebelumnya.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai digitalisasi administrasi, diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi administrasi yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung keberhasilan misi perdamaian internasional di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji mekanisme digitalisasi administrasi dalam pelaksanaan tugas *peacekeepers* di United Nations Interim Force in Lebanon (*UNIFIL*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, pengalaman, dan persepsi para *peacekeepers* terkait penerapan sistem digitalisasi administrasi.

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Ali dan Yusof (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: “*Any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowadays, as if this were a quality label in itself*”. Yang artinya “Setiap investigasi yang tidak menggunakan prosedur statistik disebut “kualitatif” saat ini, seolah-olah ini adalah label kualitas itu sendiri”.

Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan *peacekeepers* yang memiliki pengalaman langsung

dalam pengelolaan administrasi di *UNIFIL*, staf administratif, dan ahli teknologi informasi yang mendukung proses digitalisasi. Wawancara ini memiliki tujuan yaitu untuk menggali pengalaman, tantangan, dan manfaat digitalisasi administrasi dari perspektif pengguna langsung. Instrumen dalam pelaksanaan wawancara ini adalah dengan melakukan wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi tema-tema penting.

2) Observasi Partisipatif

Peneliti mengamati langsung proses administrasi digital yang dilakukan oleh *peacekeepers* di markas *UNIFIL*, tempat *peacekeepers* menjalankan tugas administratif, untuk memahami alur kerja, interaksi antar personal, serta implementasi sistem teknologi yang digunakan. Data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu berupa catatan lapangan yang mencakup pola kerja, hambatan teknis, dan dinamika tim.

3) Analisis Dokumen

Dokumen resmi seperti laporan operasional, kebijakan administrasi, dan manual penggunaan sistem digital digunakan sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi data primer yang diperoleh. Tujuan dari analisis dokumen ini adalah untuk memahami prosedur formal yang berlaku, mengidentifikasi perubahan sistem sebelum dan setelah digitalisasi, serta memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif berbasis induktif untuk menghasilkan temuan yang relevan dan mendalam. Tahapan analisis meliputi:

1) Reduksi Data

Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dikompilasi, disortir, dan disederhanakan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan penelitian. Misalnya, kutipan wawancara tentang tantangan digitalisasi dan observasi proses kerja manual sebelum digitalisasi.

2) Kategorisasi dan Tematik

Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, seperti efisiensi kerja, kendala implementasi, dan dampak digitalisasi terhadap koordinasi tim. Kategorisasi dilakukan berdasarkan teori manajemen informasi digital dan kerangka kerja administrasi.

3) Triangulasi Data

Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan untuk memvalidasi temuan. Misalnya, pendapat *peacekeepers* tentang efisiensi sistem digital dibandingkan dengan laporan evaluasi resmi *UNIFIL*.

4) Penyusunan Temuan

Temuan disusun dalam narasi kualitatif yang menjelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi dan pelaksanaan tugas *peacekeepers*, termasuk manfaat dan tantangan yang dihadapi.

Pendekatan ini sangat membantu penulis untuk menganalisis penerapan digitalisasi administrasi dalam pelaksanaan tugas sebagai *peacekeepers* di *UNIFIL*, karena teknologi informasi dan sistem digital dalam operasional pasukan penjaga perdamaian sangat dinamis dan sering beradaptasi dengan kondisi lapangan, kebutuhan misi, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme digitalisasi administrasi di *UNIFIL* berfungsi dan berkembang dalam mendukung tugas-tugas pasukan perdamaian di Lebanon.

Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks spesifik digitalisasi administrasi di *UNIFIL*. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perubahan teknis tetapi juga memahami bagaimana perubahan tersebut berdampak pada proses kerja *peacekeepers* secara holistik. Metode ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami tantangan dan peluang digitalisasi administrasi, serta menawarkan wawasan untuk pengembangan kebijakan serupa di masa depan, oleh karena itu dalam penelitian ini mengutamakan pemahaman terhadap proses perubahan yang terjadi pada sistem digitalisasi administrasi di *UNIFIL*, serta bagaimana mekanisme tersebut beradaptasi dengan situasi yang terus berubah di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian administrasi yang berkembang di masyarakat sangat beragam. Sebagai calon administrator dan ilmuwan administrasi, kita wajib tahu administrasi sebagai ilmu dan cabang- cabang yang berkembang. Administrasi memiliki dua lingkup pemaknaan, yakni administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan, sedangkan administrasi dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

Temuan ini relevan dengan masalah penelitian, yaitu bagaimana digitalisasi administrasi dapat meningkatkan efektivitas tugas *peacekeepers*. Hasil menunjukkan bahwa sistem digital berperan penting dalam mempercepat proses kerja dan meningkatkan koordinasi, namun juga memerlukan upaya adaptasi yang komprehensif untuk mengatasi hambatan yang ada.

Administrasi dalam Arti Sempit

Dalam pengertian sempit administrasi dikatakan oleh Soewarno Handayani (1988), sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, sebagai berikut: “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat- menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan sebatas ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat- menyurat, pembukuan, dan pengarsipan surat, serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi, serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam Arti Luas

Chandler dan Plano (1988) dalam “The Public Administration Dictionary” menepis makna administrasi sebatas kegiatan ketatausahaan dengan mendefinisikannya sebagai proses di mana keputusan dan kebijakan diimplementasikan”. Pihak-pihak lainnya juga mengartikan administrasi dalam arti luas. Beberapa definisi administrasi dalam pengertian luas ini dikemukakan antara lain oleh Herbert A. Simon dan Dwight Waldo. Simon (1992) mengartikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sementara sebelumnya Dwight Waldo (1971) mengartikan administrasi sebagai suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. Pengertian luas di Indonesia juga diberikan oleh Siagian (2004), yakni mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Gie (1980): “Administrasi

secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi mengandung tiga muatan, yakni:

- 1) Pertama administrasi sebagai seni adalah sebuah proses yang hanya diketahui permulaannya saja, sedang akhirnya tidak ada;
- 2) Kedua, administrasi mengandung unsur-unsur tertentu, yakni adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan untuk pelaksanaan tugas (termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi, dan unsur lainnya); dan
- 3) Ketiga, administrasi sebagai proses kerja sama yang telah ada sejak manusia ada.

Dari beberapa pengertian administrasi dalam arti luas tadi dapat disimpulkan, pada dasarnya semua kegiatan yang mengandung unsur-unsur pokok yang sama, yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerja sama, serta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adalah administrasi. Dalam pembahasan ini, administrasi yang berhubungan dengan organisasi maupun antar negara termasuk ke dalam administrasi secara internasional (umum/global) dimana penulis akan menghubungkan kaitannya dengan proses administrasi yang ada di organisasi UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*) (Astried et al., 2018).

Pada saat ini sistem administrasi digital sudah banyak dikenal dan digunakan pada organisasi kecil maupun besar di dunia. Salah satu organisasi besar yang menggunakan sistem tersebut adalah organisasi internasional PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa). PBB menggunakan sistem administrasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah koordinasi antar negara dan lembaga, dengan mengimplementasikan sistem digital untuk mengelola dan mendistribusikan dokumen-dokumen penting, seperti laporan, keputusan, dan resolusi. Sistem ini memungkinkan akses cepat dan mudah mengirim informasi bagi anggota PBB dan pihak terkait. Sistem ini juga mendukung penyimpanan yang lebih aman dan efisien dibandingkan dengan arsip fisik.

Digitalisasi administrasi bukan sekadar inovasi teknis; ia memiliki implikasi yang lebih dalam terhadap keberhasilan misi perdamaian. Dengan mengurangi beban administrasi manual, *peacekeepers* dapat lebih fokus pada tugas inti mereka: menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil. Penelitian ini menyoroti bahwa digitalisasi bukan hanya alat, tetapi juga katalis untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap misi perdamaian.

PBB juga memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola keamanan data dan informasi sensitif. Dengan menggunakan sistem enkripsi dan protokol keamanan yang ketat, PBB melindungi data pribadi dan informasi penting yang berkaitan dengan misi kemanusiaan dan diplomatik mereka. Organisasi PBB menggunakan platform digital untuk memantau dan melaporkan kinerja program-program yang dijalankan di berbagai negara, salah satunya yaitu UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*).

Sistem ini memberikan informasi yang akurat dan *up-to-date* tentang pencapaian tujuan dan dampak program, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Penerapannya, PBB sendiri menggunakan perangkat lunak manajemen proyek berbasis digital untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek-proyek besar di berbagai negara anggota. Alat kolaborasi ini memungkinkan tim yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk bekerja sama secara *real-time*, berbagi dokumen, dan memantau kemajuan proyek.

PBB memiliki sistem komunikasi internal berbasis digital untuk memfasilitasi diskusi, rapat, dan koordinasi antara berbagai lembaga dan negara anggota. Dengan

menggunakan teknologi digital seperti e-mail, konferensi video, dan platform pesan instan, PBB memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar meskipun dengan berbagai zona waktu dan lokasi. Di sisi lain PBB menggunakan sistem berbasis digital untuk mengelola data personel, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja staf.

Sistem ini membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia di berbagai program dan misi PBB di seluruh dunia. Untuk misi operasi kemanusiaan terkhususnya di wilayah Lebanon, PBB menggunakan teknologi digital untuk mendistribusikan bantuan kepada tempat lokasi yang membutuhkan. Sistem ini dapat melacak pengiriman barang, memastikan bantuan sampai tepat waktu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan penerapan berbagai sistem administrasi digital ini, PBB mampu menjalankan tugasnya secara lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap tantangan global yang terus berkembang.

PBB dalam hal pengimplementasian administrasi digital di *UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon)* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung mandat misi perdamaian PBB. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana administrasi digital diterapkan di *UNIFIL*:

Sistem dan Teknologi yang Digunakan

1) Umoja (ERP PBB)

Umoja adalah platform Enterprise Resource Planning (ERP) yang digunakan di seluruh PBB, termasuk UNIFIL, untuk mengintegrasikan proses administrasi seperti keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan pengadaan.

2) E-performance dan Inspirasi.

Sistem berbasis digital untuk pengelolaan kinerja personel dan pelatihan online.

Fungsi: (1) Penilaian kinerja staf sipil dan militer secara terintegrasi, (2)

Penyediaan modul e-learning tentang etika kerja, keamanan, dan pelatihan khusus untuk staf UNIFIL.

3) GIS (Geographic Information System).

- Digunakan untuk pengelolaan informasi geografis dan pengawasan wilayah operasional UNIFIL.
- Membantu dalam pembuatan peta digital untuk patroli, identifikasi risiko keamanan, dan pelaporan situasi di zona operasi.

4) Sistem Manajemen Dokumen.

- UNIFIL menggunakan sistem berbasis digital untuk manajemen dokumen dan arsip.
- Mengurangi penggunaan kertas melalui platform berbasis cloud yang memungkinkan akses dokumen di berbagai lokasi.
- a. Platform Komunikasi
 - Penggunaan aplikasi seperti Microsoft Teams, Zoom Meeting, dan sistem intranet PBB untuk rapat virtual dan berbagi informasi antar staf.
 - E-mail dan portal intranet digunakan untuk mendistribusikan kebijakan, laporan, dan pengumuman internal.

5) Implementasi dalam Proses Operasional

a. Manajemen Logistik.

- Platform digital digunakan untuk memantau pengiriman dan distribusi logistik (misalnya, bahan bakar, makanan, dan alat berat) ke berbagai pos UNIFIL.
- Pelaporan digital real-time membantu mencegah kekurangan logistik dan memastikan pasokan yang efisien.

b. Keuangan dan Pengadaan.

- Semua transaksi keuangan, termasuk anggaran operasional dan pengadaan barang/jasa, dikelola secara digital melalui Umoja.
- Sistem ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran.
- c. Monitoring dan Pelaporan.
 - Sistem berbasis aplikasi digunakan untuk memantau situasi keamanan di wilayah operasional.
 - Laporan patroli dan insiden diunggah dalam format digital, yang kemudian di konsolidasi di markas besar UNIFIL.
- d. E-learning dan Pelatihan
 - Staf UNIFIL mendapatkan pelatihan melalui platform digital, baik untuk keterampilan teknis maupun pelatihan *soft skills* seperti manajemen konflik dan etika kerja.

Administrasi yang tidak efisien di *UNIFIL* telah lama menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas *peacekeepers*. Ketergantungan pada sistem manual mengakibatkan birokrasi yang lambat, kehilangan data penting, dan ketidakmampuan untuk merespons situasi darurat secara cepat. Melalui digitalisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa proses administrasi dapat diotomatisasi untuk mengurangi waktu dan kesalahan manusia.

Implementasi administrasi digital di *UNIFIL* merupakan langkah strategis untuk mendukung efisiensi operasional dan memastikan misi perdamaian berjalan lancar. Dengan mengintegrasikan teknologi digital seperti *Umoja*, *GIS*, dan sistem komunikasi modern, *UNIFIL* dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan koordinasi antar unit. Salah satu alat yang digunakan para personel *peacekeepers* PBB yang ada di Lebanon untuk memperlancar komunikasi dan pengiriman data diperangkat lunak yang sering digunakan dalam tugas sehari – hari adalah aplikasi *Outlook*, dimana aplikasi ini menjadi alat utama dalam bidang komunikasi administrasi para penanggungjawab/personel staf *UNIFIL*.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu pengemban jabatan dalam bidang *IT (J6 IT ADMINISTRATION UN STAFF)* Letda Arm Budyana Reza Tarigan S.T., yang merupakan seorang prajurit TNI dalam pasukan misi perdamaian TNI Konga *FHQSU XXVI/02 TA. 2024* di Lebanon. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Letda Arm Budyana Reza Tarigan, S.T;

“Dalam mempengaruhi digitalisasi didalam tugas saya sehari – hari, digitalisasi sangat membantu mempercepat proses komunikasi dan administrasi. Sebelumnya saya memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab, diantaranya adalah penyediaan Infrastruktur IT, Keamanan dan Perlindungan Data. Dimana memastikan bahwa seluruh peralatan dan infrastruktur IT yang ada di *UNIFIL HQ (United Nations Interim Force In Lebanon Headquarters Camp)* berfungsi dengan baik, seperti jaringan komputer, sistem komunikasi, dan perangkat keras. Ini mencakup pengelolaan data dan sistem yang diperlukan untuk mendukung misi PBB yang ada di *UNIFIL* serta menjamin bahwa sistem informasi yang digunakan dalam operasi *UNIFIL* aman dari ancaman siber, serta melindungi data sensitif yang terkait dengan operasi militer dan administrasi PBB.

Namun dengan perjalanan tugas dari seorang *peacekeepers*, Letda Arm Budyana Reza Tarigan S.T., ia menemukan kesulitan dan tantangan pada tugas yang ia emban sebagai salah satu staf di *J6 IT UNIFIL*, ia menyatakan salah satu kesulitannya adalah;

“Situasi saat ini tengah terjadi peperangan antara Israel dengan kelompok bersenjata di wilayah Lebanon, adanya itu perlu pengamanan yang sangat tinggi terkhususnya dalam penyelarasan jaringan serta mengamankan diri dari danger

of attacks yang terjadi, ‘ujarnya’. Dilansir dari News UNIFIL statement (29 October 2024) sebuah roket tanpa alamat menghantam markas besar UNIFIL di Naqoura, menyebabkan sebuah gedung kendaraan hancur dan terbakar. Hal itu menyebabkan padamnya seluruh aliran listrik yang ada di UNIFIL HQ (United Nations Interim Force in Lebanon Headquarters Camp). Ini adalah salah satu dimana kendala saya dalam pekerjaan terkendala karena tidak dapat membuat dan mengirim laporan ke unit pusat (PBB) yang ada New York. Dengan demikian saya dan team beberapa hari bekerja sama dengan team engineering untuk memperbaiki wireless network dan aliran Listrik.

Disamping itu, Letda Arm Budyana Reza Tarigan S.T. sangat bersyukur dapat bergabung di misi *UNIFIL* ini, karena ia merasakan perbedaan yang sangat signifikan pada saat bekerja di Indonesia dan setelah bergabung di *UNIFIL*. Dimana ia menyatakan kelebihan dari administrasi berbasis digital ini sebagai berikut;

“Saya amat bersyukur dapat bergabung dalam misi ini, disini saya temukan banyak pelajaran dan pengalaman yang alhamdulillah dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya, walaupun saat ini Lebanon sedang tidak baik-baik saja dan keadaan inilah yang membuat saya harus berani bertahan ditengah situasi yang sedang memanas dan berani dalam mengambil keputusan. Sudah 8 bulan saya bergabung di misi UNIFIL ini banyak hal yang saya dapatkan dan rasakan di jabatan yang saya emban saat ini, dimana saya bekerja untuk menginput data, pelaporan, serta memenuhi infrastruktur TIK yang ada di UNIFIL HQ Camp (United Nations Interim Force In Lebanon Headquarters Camp). Dengan adanya administrasi berbasis digital yang canggih ini sangat memudahkan saya dalam proses bekerja, dimana prosesnya begitu cepat, akurat, dan sangat mudah dikerjakan, contohnya mengirim laporan bulanan tentang jumlah personil yang ada di UNIFIL HQ Camp (United Nations Interim Force in Lebanon Headquarters Camp) ke DFC MA (Deputy Force Commander - Military Affairs) melalui perangkat lunak yaitu aplikasi Outlook dengan berisikan file dan dikirim melalui email, dan adanya penyimpanan data/arsip yang sangat relevan hal ini sangat membantu mengurangi terjadinya kebocoran data/arsip tersebut. Berbeda dengan pada saat saya bekerja di Indonesia terkhususnya dalam lingkup TNI khususnya TNI AD, dalam proses pembuatan administrasinya masih dengan cara manual dimana kita sendiri yang harus mengerjakan produk-produk tersebut, contoh salah satunya proses pengiriman SPRINT Nama Personil 5 Satgas TNI Konga TA. 2024-2025 yang terlebih dahulu harus di check/koreksi kebenaran dan keabsahan isi dari SPRINT tersebut sebelum disebarluaskan, ketika sudah di check/koreksi dan tidak ada temuan kesalahan, SPRINT tersebut dapat disebarluaskan ke Badan-badan/Unit satuan yang dituju dengan menggunakan pengiriman melalui pengiriman ekspedisi yaitu JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yang telah bekerja sama dengan TNI AD.

Jadi, menurut saya administrasi digital ini sangat membantu proses yang cepat, akurat, dan pastinya sangat membantu mengurangi risiko kesalahan/kebocoran data akibat kesalahan ataupun kelalaian manusia”

Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada adaptasi budaya organisasi. Hambatan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pelatihan menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi dengan aspek manusia dan organisasi. Oleh karena itu, studi ini mengundang pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana digitalisasi dapat

dirancang agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan kapabilitas personal.

Begitu pun sama seperti apa yang dirasakan oleh penulis dalam penelitian ini, dimana penulis dapat merasakan bagaimana manfaat kecanggihan teknologi terkhususnya pada bidang administrasi berbasis digital yang memudahkan dalam proses pengiriman dan pengarsipan data walaupun pada saat ini para *peacekeepers* yg ada di *UNIFIL* hanya mengandalkan sinyal Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) untuk mengakses sistem – sistem yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah:

- 1) Pelatihan Berkelanjutan: Menyediakan program pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan teknologi bagi *peacekeepers*, terutama dari negara-negara berkembang.
- 2) Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Menginvestasikan infrastruktur digital yang lebih handal dan aman untuk mendukung operasional *UNIFIL*.
- 3) Pendekatan Multinasional: Mengembangkan standar teknologi yang dapat diadopsi oleh seluruh negara anggota untuk meningkatkan interoperabilitas.
- 4) Sistem *Backup*: Membangun mekanisme cadangan data untuk mengatasi risiko kegagalan sistem.

Penelitian ini juga mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi digitalisasi administrasi, seperti:

- 1) Pemberdayaan Personel Lapangan: Memberikan akses teknologi yang mudah digunakan kepada *peacekeepers* di lapangan untuk mendukung respons cepat.
- 2) Pendekatan Bertahap: Melakukan implementasi teknologi secara bertahap untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan adaptasi.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi: Membuat sistem evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas digitalisasi administrasi.

Kesimpulan

Penerapan digitalisasi administrasi di dalam misi *UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon)* menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional pasukan penjaga perdamaian. Melalui digitalisasi, *UNIFIL* berhasil memperbaiki koordinasi antar unit, meningkatkan manajemen logistik, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang kompleks di lapangan. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama mengenai sistem digitalisasi administrasi dalam pelaksanaan tugas di *UNIFIL*: (1) Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Akurasi Koordinasi. (2) Transparansi dan Akuntabilitas. (3) Kemudahan Akses Informasi. (4) Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Baik. (5) Koordinasi dan Kolaborasi Antar Unit yang Lebih Lancar. (6) Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik. (7) Pengurangan Ketergantungan pada Proses Manual.

BIBLIOGRAFI

- Ali, A. Md., & Yusof, H. (2011). Quality in Qualitative Studies: The Case of Validity, Reliability and Generalizability. *Issues In Social And Environmental Accounting*, 5(1). <https://doi.org/10.22164/isea.v5i1.59>
- Astried, S., Sumertha, I. G., & Saragih, H. (2018). Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia Dalam Misi United Nations Interim Forces in Lebanon Tahun 2015-2017: Dampak Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 4.

- Bellamy, A. J., Williams, P. D., & Griffin, S. (2010). *Understanding peacekeeping*. Polity.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). The Public Administration Dictionary. Second Edition. In *Santa Barbara, CA:ABC-CLIO Inc.*
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Gie, T. L. (1980). *Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah. Jakarta: Pradnya Paramita.*
- Masyrofah, M., & Lubis, A. (2022). Women, Peace, and Conflict; Increasing The Capability and Number of Indonesian Women Peacekeepers in the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). *Jurnal Cita Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.24764>
- Maxwell, L., Shreedhar, P., Dauga, D., McQuilton, P., Terry, R. F., Denisiuk, A., Molnar-Gabor, F., Saxena, A., & Sansone, S. A. (2023). FAIR, ethical, and coordinated data sharing for COVID-19 response: a scoping review and cross-sectional survey of COVID-19 data sharing platforms and registries. In *The Lancet Digital Health* (Vol. 5, Issue 10). [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(23\)00129-2](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00129-2)
- Ndou, V. (2004). E – Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18(1). <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2004.tb00117.x>
- Newby, V. F. (2018). Power, politics and perception: the impact of foreign policy on civilian–peacekeeper relations. *Third World Quarterly*, 39(4). <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1334542>
- Ramadhan, W. E. (2022). Digitalisasi dan Kebijakan: Pemanfaatan Big Data Dalam Pembentukan Kebijakan. *ResearchGate*.
- Siagian, S. P. (2004). Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.*
- Simon, H. A. (1992). What Is an Explanation of Behavior? *Psychological Science*, 3(3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00017.x>
- Sumertha, G., Risma Saragih, H. J., & Astried, S. (2020). Indonesian Female Peacekeepers Participation in United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) during 2015–2017. *Athens Journal Of Mediterranean Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.30958/ajms.7-1-2>
- Williams, M., & O'Neill, M. G. (2023). The Digital Transformation of UN Peacekeeping and the Role of the Irish Defence Forces. In *The EU, Irish Defence Forces and Contemporary Security*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07812-5_13

Copyright holder:

Nurul Azhari Giawa, Nodi Marefanda, M.A.P. (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

